

**PENDAMPINGAN PROGRAM EVALUASI SINERGITAS KINERJA ANTAR
KECAMATAN UNGGUL DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Devita Tyas Ayu Firnanda¹, Rizky Dwijayanti²
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: devitatyasa@gmail.com, rizky@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian ini dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam suatu bentuk proses pembelajaran mahasiswa yang mendukung program pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan program teknis praktis yang ditemukan di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keahlian praktis yang sesuai dengan situasi dan kondisi kerja nyata yang diperoleh diperguruan tinggi sehingga mahasiswa diharapkan lebih memahami dan memiliki keterampilan dalam suatu disiplin ilmu. Adapun metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian ini meliputi sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan ini dimulai pada awal bulan Maret 2024, penulis terlebih dahulu melakukan survey untuk mencari informasi seputar instansi Pemerintahan yang sedang membuka lowongan untuk menerima kegiatan magang bagi mahasiswa. 2. Tahap Pelaksanaan penulis melaksanakan magang regular pada 8 Juli sampai 31 Agustus 2024 di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan total 40 hari kerja. 3. Tahap Laporan penulis menguraikan hasil pendekatan observasi partisipatif selama kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. 4. Tahap Penyusunan Luaran Magang yang dilakukan penulis selama pengabdian di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur akan disusun menjadi hasil akhir laporan pengabdian yang terdiri dari laporan magang, artikel pengabdian, dan video magang, dan konsultasi laporan pengabdian dan artikel dengan dosen pembimbing magang. Evaluasi Sinergitas Kinerja Antar Kecamatan Unggul di Provinsi Jawa Timur juga penting dalam rangka mendorong Camat dalam melaksanakan semua tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, guna meningkatkan kreativitas dan inovasi serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai program yaitu setiap tahunnya mengevaluasi kinerja Kecamatan unggul antar Provinsi Jawa Timur. (Rossa Ilma Silfiah et al., 2023).

Kata Kunci : *Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Evaluasi Sinergitas Kinerja Antar Kecamatan Unggul*

ABSTRACT

Community Service is a compulsory course for all students of Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya in a form of student learning process that supports educational programs at Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya and practical technical programs found in the field. This activity aims to equip students with practical skills that are in accordance with real work situations and conditions obtained in higher education so that students are expected to better understand and have skills in a discipline. The implementation methods for this community service activity include the following: 1. The Preparation Stage begins in early March 2024, the author first conducts a survey to find information about government agencies that are opening vacancies to accept internship activities for students. 2. The Implementation Stage the author carries out a regular internship from July 8 to August 31, 2024 at the Regional Secretariat of East Java Province with a total of 40 working days. 3. The Report Stage the author describes the results of the participatory observation approach during the community service activities carried out at the Regional Secretariat of East Java Province. 4. The stage of compiling the output of the internship carried out by the author during his service at the Regional Secretariat of East Java Province will be compiled into the final results of the service report consisting of an internship report, service articles, and internship videos, and consultations on service reports and articles with the internship supervisor. Evaluation of Performance Synergy Between Superior Sub-districts in East Java Province is also important in order to encourage Sub-district Heads to carry out all their duties as mandated in the provisions of Article 10 of Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Sub-districts, in order to increase creativity and innovation and to improve the quality of public services in the Sub-district. The Bureau of Government and Regional Autonomy has a program, namely annually evaluating the performance of superior sub-districts between East Java Provinces.

Keywords : *Bureau of General Government and Regional Autonomy, Regional Secretariat of East Java Province, Evaluation of Performance Synergy Between Superior Sub-Districts.*

PENDAHULUAN

Pengabdian merupakan sebuah mata kuliah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam suatu bentuk proses pembelajaran mahasiswa yang mendukung program pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan program teknis praktis yang ditemukan di lapangan. Penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan pengalaman langsung di dunia kerja yang mengarah kepada pencapaian tingkat keahlian profesional dalam sebuah pekerjaan tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keahlian praktis yang sesuai dengan situasi dan kondisi kerja nyata yang diperoleh diperguruan tinggi sehingga mahasiswa diharapkan lebih memahami dan memiliki keterampilan dalam suatu disiplin ilmu.

Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan Pusat Pemerintahan tingkat Provinsi yang bertugas mendukung Gubernur dalam menjalankan roda Pemerintahan. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah salah satu unit kerja di dalamnya yang memiliki peran penting dalam mengelola Pemerintahan dan otonomi Daerah di Wilayah Jawa Timur. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan berjalannya pemerintahan yang baik dan efektif di tingkat Provinsi. Melalui berbagai program dan kebijakan yang mereka buat, Biro ini berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Secara umum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berperan sebagai "otak" dalam menjalankan Pemerintahan di tingkat Provinsi. Mereka merancang strategi, membuat kebijakan, dan memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik oleh seluruh Perangkat Daerah.

Kantor Kecamatan memiliki peran krusial dalam menjalankan pembangunan karena merupakan salah satu instrumen yang akan mendukung dan mempermudah upaya-upaya pembangunan di wilayah Kecamatan. Keberhasilan pembangunan ini membutuhkan sistem dan pegawai yang kompeten, responsif, dan inovatif serta pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern dalam cara kerja dan keterampilan teknis, termasuk dalam memberikan pelayanan yang prima (excellent service) kepada masyarakat. Saat ini, terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan otonomi Daerah terutama terkait peran serta Pemerintah Kecamatan. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi hanya sebagai wilayah administratif Pemerintah, tetapi beralih menjadi bagian integral dari struktur daerah dengan fokus pada desentralisasi. Artinya, Kecamatan menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan urusan otonomi Daerah, khususnya dalam memberikan layanan publik di tingkat Kabupaten/Kota. (Diartho et al., 2023)

Tugas-tugas Kecamatan dijalankan oleh staf-staf yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah, dengan tanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah setempat. Camat bertanggung jawab atas urusan pelayanan publik yang diberikan dalam lingkup Kecamatan, dengan bantuan dari tim administratif Kecamatan, dan kepada Kepala Daerah melalui pejabat Sekretariat Daerah tingkat Kabupaten atau Kota.

Alasan diadakannya program penilaian sinergitas Kecamatan mewujudkan Jawa Timur berprestasi adalah mengukur kinerja Kecamatan setiap tahunnya, serta mendorong Kecamatan agar lebih inovatif dan kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sebagai upaya mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Penilaian Sinergisitas Kinerja Kecamatan (SKK), sebuah evaluasi yang bertingkat dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi Kecamatan unggulan yang dapat dijadikan contoh bagi yang lain di wilayah tersebut. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah

Kecamatan, Pemerintah Daerah, hingga Pemerintah Pusat, termasuk juga dengan perhatian khusus dari Menteri. Maksud tujuan kegiatan ini digelar adalah untuk memberikan pemahaman dan perspektif pada Camat dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar serta pemberdayaan masyarakat di Wilayahnya dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di Wilayah kerjanya. (Agustino et al., 2024)

Tujuan dari penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Antar Provinsi Jawa Timur juga cukup banyak, diantaranya inovasi dan kerjasama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Selain itu juga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, tanggung jawab mengenai perizinan, penanganan kebencanaan, sinergitas RT/RW, dan kondusivitas wilayah. Kegiatan ini juga untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja Kecamatan dalam mengemban amanahnya. (Gani et al., 2024)

Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Antar Provinsi Jawa Timur juga penting dalam rangka mendorong Camat dalam melaksanakan semua tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, guna meningkatkan kreativitas dan inovasi serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan. Kegiatan Sinergitas Kinerja Kecamatan diharapkan bisa berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik seluruh masyarakat karena pelayanan publik merupakan elemen yang sangat signifikan dalam operasi instansi Pemerintah dan merupakan aspek utama yang harus diprioritaskan dalam interaksi dengan masyarakat. Kualitas layanan menjadi tolok ukur kinerja sebuah institusi Pemerintahan, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan, terutama bagi Kantor Kecamatan yang berperan sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Penilaian terhadap inovasi layanan di Kecamatan memegang peran penting dalam evaluasi. Aspek inovatif Kecamatan secara konsisten menjadi fokus utama dalam penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) setiap tahunnya.

METODE PELAKSANAAN

Magang reguler yang dilaksanakan penulis selama 40 hari kerja, terhitung sejak tanggal 8 Juli sampai 31 Agustus 2024. Jenis pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yaitu pendampingan program evaluasi sinergitas kinerja antar Kecamatan unggul di Provinsi Jawa Timur. Lokasi magang Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya bertempat di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Jam masuk pegawai mulai dari 08.00-16.00.

Dalam proses pengabdian, metode pelaksanaan yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengabdian ini yakni dengan terjun langsung ke lapangan yang dilakukan dengan harapan dapat menambah wawasan pengetahuan dan menambah pengalaman, untuk bekal diri sendiri yang akan terjun dalam lingkungan kerja bidang administrasi publik. Pengabdian ini menggunakan jenis pendekatan observasi partisipatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh, dengan menggunakan kata-kata dan narasi untuk menggambarkan makna dan pengalaman subjek penelitian. Penulis juga melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan bahan-bahan sebagai bukti. Adapun metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian ini meliputi sebagai berikut:



1. Tahap Persiapan

Tahap ini dimulai pada awal bulan Maret 2024, penulis terlebih dahulu melakukan survey untuk mencari informasi seputar instansi Pemerintahan yang sedang membuka lowongan untuk menerima kegiatan magang bagi mahasiswa. Setelah mendapatkan konfirmasi dari instansi, penulis membuat proposal magang, setelah itu penulis mengajukan surat pengantar magang guna menyelesaikan urusan administratif di link TU Fakultas yang telah disediakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Setelah mendapatkan surat pengantar magang lalu diberikan kepada pihak penanggung jawab magang. Setelah itu pihak penanggung jawab magang membalas surat permohonan izin magang dan memberitahu bahwa penulis diterima untuk melakukan kegiatan magang di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Tahap Pelaksanaan

Memasuki tahap pelaksanaan, penulis melaksanakan magang regular pada 8 Juli sampai 31 Agustus 2024 di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan total 40 hari kerja. Saat proses pelaksanaan, penulis melakukan pembelajaran dengan terjun langsung ke lapangan. Pengabdian ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya.

3. Tahap Laporan

Pada tahap ini penulis menguraikan hasil pendekatan observasi partisipatif selama kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

4. Tahap Penyusunan Luaran Magang

Hasil pendekatan observasi partisipatif yang dilakukan penulis selama pengabdian di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur akan disusun menjadi hasil akhir laporan pengabdian. Luaran pengabdian berupa laporan magang, artikel pengabdian, dan video magang, dan konsultasi laporan dan artikel dengan dosen pembimbing magang.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil pengabdian yang dilakukan oleh praktikan selama 40 Hari Kerja dan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu pengalaman dan juga wawasan. Dan hasil pengabdian tersebut sejalan dengan apa yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, berikut hasil yang diperoleh selama kegiatan magang berlangsung yaitu berupa skill profesi maupun data-data observasi sebagai berikut :

- **Secara *Hard Skill***

- Mahasiswa jadi mengetahui mengarsipkan lembar disposisi ke Microsoft Excel.
- Mahasiswa jadi mengetahui mengarsipkan buku kas umum ke Microsoft Excel.
- Mahasiswa jadi mengetahui Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengukuhan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati dan Pejabat Sementara (Pjs) Walikota.
- Mahasiswa mengetahui jadi kegiatan acara SKK yaitu Sinergitas Kinerja Kecamatan yang dihadiri oleh Kecamatan unggul yang ada di Jawa Timur.

- **Secara *Soft skill***

- Meningkatkan kemampuan berkomunikasi
- Meningkatkan keter ampilan bekerja dalam tim
- Menambah pengetahuan tentang ilmu baru

4.1 Penilaian Presentasi Sinergitas Kinerja antar Kecamatan di Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan Penilaian Presentasi Sinergitas Kinerja Kecamatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 07 Agustus sampai dengan 09 Agustus 2024. Acara kegiatan Sinergitas Kinerja Kecamatan diadakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Jatim. Maksud dan tujuan kegiatan ini digelar adalah untuk memberikan pemahaman dan perspektif pada Camat dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar serta pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Maksud kegiatan ini adalah juga untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja Kecamatan dalam mengemban amanahnya. Jawa Timur saat ini dinobatkan menjadi Provinsi terinovatif di Indonesia. Disebut sebagai inovatif karena Camat nya juga inovatif. Pemberian penghargaan Sinergitas Kinerja Kecamatan kepada Camat terbaik pada agenda kegiatan ini. Kompetensi sinergi Kecamatan diadakan dalam rangka peningkatan layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya dengan kegiatan Sinergitas Kinerja Kecamatan bisa mengakselerasi Kecamatan dengan sumber daya yang ada dalam memberikan layanan publik yang terbaik bagi masyarakatnya.

Melalui kompetisi dan penghargaan Sinergitas Kecamatan yang diberikan, pihaknya ingin para Camat bisa memberikan dukungan yang signifikan. Karena tanpa bimbingan Camat, maka Desa tidak bisa dikendalikan. Sehingga kegiatan ini berkeinginan dapat memberikan apresiasi kepada Camat agar tambah semangat dan bisa melakukan inovasi sehingga Jawa Timur tetap terdepan dalam inovasinya. Sinergitas Kecamatan di Jawa Timur untuk memetakan inovasi yang dilakukan oleh Kecamatan seperti inovasi stunting, Pemerintah Provinsi mendorong Kecamatan untuk membuat inovasi, kegiatan ini tidak hanya untuk mengukur Kinerja Kecamatan tetapi juga sebagai katalisator pengembangan inovasi Kecamatan dalam pelayanan dasar.

Pada tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan 09 Agustus 2024 bertempat di ruangan Binaloka Adhikara Provinsi Jawa Timur, dilaksanakan Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Timur, dimana lomba ini diadakan setiap tahun. Dan yang terpilih hanya Kecamatan yang memiliki kompetensi yang bagus. Setiap tahun juga mengirim perwakilan 1 Camat untuk mengikuti lomba tersebut. Lomba Sinergitas Kecamatan tersebut dilaksanakan sesuai amanat PP 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Di mana dalam PP tersebut diamanatkan bahwa Bupati selaku Kepala Daerah melakukan evaluasi dan supervisi terhadap Kecamatan. Sesuai instrumen dari Bupati maka dalam mengevaluasi Kecamatan dilaksanakan dengan Sinergitas Kinerja Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Antar Provinsi Jawa Timur adalah mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara Pemerintahan di Wilayah, guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan, dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di Wilayah kerjanya.

Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Antar Provinsi Jawa Timur dihadiri oleh para Camat, Bupati/Walikota, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta Bakorwil, dan Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan.

Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Provinsi Jawa Timur mengadakan penilaian lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Tinjau lapang oleh Tim Penilai ini dilakukan setelah masing-masing Kecamatan menyampaikan presentasi Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Timur terkait kreativitas dan inovasi dalam mensinergikan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Penilaian yang didasarkan pada administrasi dalam aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN).

Penilaian ini juga penting dalam rangka mendorong Camat dalam melaksanakan semua tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, guna meningkatkan kreativitas dan inovasi serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan. Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dilakukan Karena tanpa bimbingan Camat, maka Desa tidak bisa dikendalikan. Sehingga kegiatan ini dapat memberikan apresiasi kepada Camat agar tambah semangat dan bisa melakukan inovasi sehingga Jawa Timur tetap terdepan dalam inovasinya.

4.2 Indikator Pendampingan Program Evaluasi Sinergitas Kinerja antar Kecamatan Unggul di Provinsi Jawa Timur

Penjurian Sinergitas Kinerja Kecamatan merupakan salah satu kegiatan penting dari rangkaian kegiatan Sinergitas Kinerja Kecamatan dimana hasil penjurian nanti akan dijadikan bahan Berita Acara untuk pengiriman Kecamatan Terbaik sebagai perwakilan dari Kota/Kabupaten. Penjurian ini menilai Faktor Pimpinan Camat terdiri atas 4 indikator yaitu; 1) Kepemimpinan Camat, 2) Kreativitas Camat, 3) Komitmen Camat dalam melayani, dan 4) Kompetensi Camat. Indikator Kepemimpinan Camat menilai bagaimana kepemimpinan Camat dalam menggerakkan semua sektor sumber daya yang ada di Kecamatan untuk menyelesaikan masalah di wilayahnya. Apakah Camat terlihat memiliki kemampuan Sinergisitas, kolaborasi, koordinasi, dan fasilitasi serta kemampuan manajerial dalam mengelola anggaran dan SDM Kecamatan.

Ada 7 Indikator penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Jatim Tahun 2024, meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum, penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan, pelaksanaan tugas delegatif, penyelenggaraan tugas atributif, inovasi atau kreativitas Kecamatan pada segala aspek penilaian. Penilaian juga pada pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan serta pelaksana tugas lainnya. Terkait penilaian, kriteria yang dinilai oleh tim dari juri ada tiga tahap penilaian, mulai dari seleksi administrasi, paparan hingga visitasi tentang inovasi atau kreatifitas dalam penyelenggaraan Kecamatan.

4.3 Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik

Perspektif New Public Management (NPM) berbeda dengan perspektif administrasi publik klasik terutama dalam hal cara mencapai nilai, namun dalam hal nilai yang dianut pada umumnya tetap sama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Perbedaan cara ini memiliki konsekuensi terhadap manajemen sumber daya manusia dalam organisasi publik. Perubahan cara mencapai nilai disebabkan oleh faktor lingkungan administrasi publik. Perubahan faktor lingkungan, seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik menyebabkan cara-cara yang selama ini digunakan oleh administrasi publik klasik menjadi tidak efisien lagi.

Perubahan lingkungan ekonomi, dari kondisi stabil menjadi tidak stabil menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan ekonomi secara drastis baik dari segi makro maupun mikro, nasional maupun internasional. Hal yang sama terjadi pada bidang politik dari Pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Demikian pula dunia teknologi kecanggihannya yang sangat cepat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan persepsi dan sekaligus perubahan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Adanya pengaruh faktor lingkungan tersebut menyebabkan perubahan cara organisasi publik menyelenggarakan pelayanan publik dan karena itu terjadi pula perubahan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi publik sebagai salah satu dimensi

penting untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Perubahan cara tersebut dilakukan dengan mengadopsi pada sistem, gaya, metode, dan mekanisme manajemen bisnis. Pengadopsian seperti itu dianggap akan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penggunaan cara-cara manajemen bisnis dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu keharusan karena tuntutan masyarakat sebagai pelanggan yang menghendaknya. Sistem Pemerintahan yang pada umumnya bersifat sentralistik pada perspektif administrasi publik klasik ternyata tidak dapat dipertahankan lagi dan digantikan dengan sistem Pemerintahan desentralisasi. Sistem ini dianggap mampu mengenali masalah-masalah publik lebih dekat dan mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan cepat. Sistem ini juga dianggap mampu memahami kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan pelanggan dengan cepat dan akurat, serta dapat memenuhi dalam kurun waktu yang cepat pula.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, berdasarkan perspektif NPM, Pemerintah (organisasi publik) bukan lagi pemain utama melainkan berfungsi sebagai pengarah (steering). Sebagai pengarah Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak lain (organisasi swasta dan organisasi non Pemerintah) untuk terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelibatan pihak lain tersebut akan mengurangi beban Pemerintah yang selama ini diemban sendiri, sehingga Pemerintah dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas lain yang tidak memungkinkan atau tidak efisien dijalankan oleh pihak lain.

4.4 Kecamatan Peserta Pendampingan Program Evaluasi Sinergitas Kinerja Antar Kecamatan Unggul di Provinsi Jawa Timur

Beberapa dari Kecamatan yang dipilih mengikuti kegiatan Pendampingan Program Evaluasi Sinergitas Kinerja Antar Kecamatan Unggul di Provinsi Jawa Timur oleh Biro Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah sebanyak 36 Kecamatan dari berbagai Kota atau Kabupaten. Diantaranya 36 Kecamatan dari berbagai Kota atau Kabupaten sebagai berikut :

1. Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan
2. Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun
3. Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang
4. Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
5. Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo
6. Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan
7. Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep
8. Kecamatan Klojen Kabupaten Malang
9. Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
10. Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo
11. Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban
12. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

13. Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
14. Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
15. Kecamatan Wates Kabupaten Blitar
16. Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro
17. Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek
18. Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang
19. Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo
20. Kecamatan Pesantren Kota Kediri
21. Kecamatan Tandes Kota Surabaya
22. Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri
23. Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang
24. Kecamatan Batu Kota Batu
25. Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan
26. Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk
27. Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan
28. Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung
29. Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
30. Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto
31. Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
32. Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi
33. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
34. Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
35. Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto
36. Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

Dari 36 Kecamatan berbagai Kota atau Kabupaten tersebut yang terpilih sebagai Sinergitas Kinerja Antar Kecamatan Unggul di Provinsi Jawa Timur adalah yang pertama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan didasarkan hasil penilaian administrasi dalam aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) yang menyatakan Kecamatan Pandaan sebagai peringkat pertama Penilaian SKK tingkat **Kabupaten** Pasuruan Tahun 2024. Selanjutnya Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang sendiri memiliki sejumlah inovasi yang menjadi unggulan, di antaranya, kopi ireng tanpa gula, pasar kue subuh (DOMASA), kampung budaya Desa Wisata Sumbereto, budidaya melon system green house, kampung tangguh bencana serta wisata paralayang bukit waung. Kecamatan Donomulyo dapat menunjukkan kemampuan dan potensi terbaiknya pada kegiatan hari ini agar menjadi teladan bagi

Kecamatan lainnya di Kabupaten Malang untuk terus berkinerja, berkarya, dan berinovasi memaksimalkan potensi daerah masing-masing. Selanjutnya Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan didasarkan hasil penilaian administrasi dalam aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) yang menyatakan Bugul Kidul sebagai peringkat pertama penilaian SKK tingkat **Kota** Pasuruan Tahun 2024.



Gambar 1 Acara Penilaian Sinergitas Kinerja antar Kecamatan Unggul Provinsi Jawa Timur Diadakan di Gedung Binaloka Adhikara Provinsi Jawa Timur



Gambar 2 Suasana Ruangan Pertemuan Camat dan Perangkat Kecamatan antar Provinsi Jawa Timur untuk Melaksanakan Kegiatan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2024

Faktor-faktor Pendukung Sebagai Upaya Mewujudkan Kecamatan Unggul di Provinsi Jawa Timur

□ Partisipasi Masyarakat yang Aktif

- Keterlibatan Masyarakat : Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.
- Pemberdayaan Masyarakat : Memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di Wilatyahnya.
- Sosialisasi yang efektif : Melakukan sosialisai secara intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pembangunan Kecamatan unggul.

□ Sumber Daya yang Memadai

- Anggaran yang cukup : Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan.
- Sumber Daya Manusia yang berkualitas : Tenaga kerja yang kompeten dan memiliki dedikasi yang tinggi.
- Infrastruktur yang memadai : Ketersediaan infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.

□ Pengembangan Potensi Lokal

- Pemanfaatan sumber daya alam : Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.
- Pengembangan sektor unggulan : Fokus pada pengembangan sektor unggulan yang sesuai dengan potensi Wilayah, misalnya pertanian, perikanan, pariwisata, atau industri kecil menengah.
- Pelestarian lingkungan : Melakukan upaya pelestarian lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

4.5 Solusi bagi Kecamatan yang Belum Unggul

□ Pengembangan Ekonomi Lokal

- Pemberdayaan UMKM : Memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran.
- Pengembangan Sektor Unggulan : Mengidentifikasi dan mengembangkan sektor unggulan yang sesuai dengan potensi lokal, misalnya pertanian, perikanan, pariwisata, atau industri kreatif.
- Peningkatan Kualitas Produk Lokal : Membantu meningkatkan kualitas produk lokal agar lebih kompetitif di pasar.

□ Pembangunan Infrastruktur

- Peningkatan Konektivitas : Memperbaiki jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya untuk meningkatkan konektivitas antar Wilayah.
- Penyediaan Fasilitas Umum : Menyediakan fasilitas umum yang memadai seperti pasar, tempat ibadah, dan ruang terbuka hijau.
- Peningkatan Akses terhadap Teknologi : Memperluas akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

TEORI PENDUKUNG

- Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi hanya sebagai wilayah administratif Pemerintah, tetapi beralih menjadi bagian integral dari struktur Daerah dengan fokus pada desentralisasi. Artinya, Kecamatan menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan urusan otonomi Daerah, khususnya dalam memberikan layanan publik di tingkat Kabupaten/Kota.

Tugas-tugas Kecamatan dijalankan oleh staf-staf yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah, dengan tanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah setempat. Camat bertanggung jawab atas urusan pelayanan publik yang diberikan dalam lingkup Kecamatan, dengan bantuan dari tim administratif Kecamatan, dan kepada Kepala Daerah melalui pejabat Sekretariat Daerah tingkat Kabupaten atau Kota. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mengukur kinerja Kecamatan setiap tahunnya, serta mendorong Kecamatan agar lebih inovatif dan kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagai upaya mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK), sebuah evaluasi yang bertingkat dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi Kecamatan unggulan yang dapat dijadikan contoh bagi yang lain di wilayah tersebut. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Daerah, hingga Pemerintah Pusat, termasuk juga dengan perhatian khusus dari Menteri. Maksud tujuan kegiatan ini digelar adalah untuk memberikan pemahaman dan perspektif pada Camat dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar serta pemberdayaan masyarakat di Wilayahnya. Kegiatan ini juga untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja Kecamatan dalam mengemban amanahnya.

Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Antar Provinsi Jawa Timur juga penting dalam rangka mendorong Camat dalam melaksanakan semua tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, guna meningkatkan kreativitas dan inovasi serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan. Kegiatan Sinergitas Kinerja Kecamatan diharapkan bisa berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik seluruh masyarakat karena pelayanan publik merupakan elemen yang sangat signifikan dalam operasi instansi Pemerintah dan merupakan aspek utama yang harus diprioritaskan dalam interaksi dengan masyarakat.

Kualitas layanan menjadi tolok ukur kinerja sebuah institusi Pemerintahan, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan, terutama bagi Kantor Kecamatan yang berperan sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Penilaian terhadap inovasi layanan di Kecamatan memegang peran penting dalam evaluasi. Aspek inovatif Kecamatan secara konsisten menjadi fokus utama dalam penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) setiap tahunnya.

- Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik

Perspektif New Public Management (NPM) berbeda dengan perspektif administrasi publik klasik terutama dalam hal cara mencapai nilai, namun dalam hal nilai yang dianut pada umumnya tetap sama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Perbedaan cara ini memiliki konsekuensi terhadap manajemen sumber daya manusia dalam organisasi publik. Perubahan cara mencapai nilai disebabkan oleh faktor lingkungan administrasi publik. Perubahan faktor lingkungan, seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik menyebabkan cara-cara yang selama ini digunakan oleh administrasi publik klasik menjadi tidak efisien lagi.

Perubahan lingkungan ekonomi, dari kondisi stabil menjadi tidak stabil

menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan ekonomi secara drastis baik dari segi makro maupun mikro, nasional maupun internasional. Hal yang sama terjadi pada bidang politik dari Pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Demikian pula dunia teknologi kecanggihannya yang sangat cepat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan persepsi dan sekaligus perubahan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Adanya pengaruh faktor lingkungan tersebut menyebabkan perubahan cara organisasi publik menyelenggarakan pelayanan publik dan karena itu terjadi pula perubahan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi publik sebagai salah satu dimensi penting untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Perubahan cara tersebut dilakukan dengan mengadopsi pada sistem, gaya, metode, dan mekanisme manajemen bisnis. Pengadopsian seperti itu dianggap akan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penggunaan cara-cara manajemen bisnis dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu keharusan karena tuntutan masyarakat sebagai pelanggan yang menghendaknya. Sistem Pemerintahan yang pada umumnya bersifat sentralistik pada perspektif administrasi publik klasik ternyata tidak dapat dipertahankan lagi dan digantikan dengan sistem Pemerintahan desentralisasi. Sistem ini dianggap mampu mengenali masalah-masalah publik lebih dekat dan mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan cepat. Sistem ini juga dianggap mampu memahami kebutuhan kebutuhan dan keinginan-keinginan pelanggan dengan cepat dan akurat, serta dapat memenuhi dalam kurun waktu yang cepat pula.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, berdasarkan perspektif NPM, Pemerintah (organisasi publik) bukan lagi pemain utama melainkan berfungsi sebagai pengarah (*steering*). Sebagai pengarah Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak lain (organisasi swasta dan organisasi non Pemerintah) untuk terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelibatan pihak lain tersebut akan mengurangi beban Pemerintah yang selama ini diemban sendiri, sehingga Pemerintah dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas lain yang tidak memungkinkan atau tidak efisien dijalankan oleh pihak lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan Pusat Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengkoordinasikan berbagai aspek Pemerintahan di tingkat Provinsi, serta dalam membina dan mengembangkan Pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota. Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berada di Jl.Pahlawan No.110, Kel. Alun-Alun Contong Kec. Bubutan-Surabaya. Jenis pengabdian yang digunakan pendekatan observasi partisipatif. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara observasi partisipatif untuk mengidentifikasi mengenai Pendampingan Program Evaluasi Sinergitas Kinerja Antar Kecamatan Unggul di Provinsi Jawa Timur. Evaluasi Sinergitas Kinerja Antar Kecamatan Unggul

di Provinsi Jawa Timur juga penting dalam rangka mendorong Camat dalam melaksanakan semua tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, guna meningkatkan kreativitas dan inovasi serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai program yaitu setiap tahunnya mengevaluasi kinerja Kecamatan unggul antar Provinsi Jawa Timur. Dalam evaluasi ini Kecamatan mana yang paling bagus mengembangkan potensi wilayahnya masing-masing dan Kecamatan mana yang memiliki kinerja yang bagus. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mengukur kinerja antar Kecamatan Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya, serta mendorong Kecamatan agar lebih inovatif dan kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari evaluasi sinergitas kinerja antar Kecamatan unggul Provinsi Jawa Timur digelar untuk memberikan pemahaman dan perspektif pada Camat dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar serta pemberdayaan masyarakat di wilayahnya dan pemberdayaan potensi ekonomi dan wisata masyarakat di wilayahnya masing-masing. Kegiatan ini juga untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja antar Kecamatan unggul Provinsi Jawa Timur dalam mengemban amanahnya. Dalam menggali potensi lokal Kecamatan dapat dilakukan dengan pengembangan ekonomi lokal seperti mengembangkan usaha-usaha produktif yang sesuai dengan kondisi Daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua dengan pengembangan potensi wisata di wilayahnya masing-masing dapat menjadikan potensi unggul di wilayah Kecamatan itu sendiri seperti contoh Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang mempunyai wisata paralayang bukit waung. Selanjutnya koordinasi yang efektif antara Kecamatan dan Kelurahan sangat diperlukan untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang efisien dan efektif.

Dengan koordinasi yang baik, berbagai program dan kebijakan Pemerintah dapat dilaksanakan secara terpadu dan sinergis, sehingga menghindari tumpang tindih dan inefisiensi. Selanjutnya dilaksanakan pencapaian tujuan pembangunan. Dengan koordinasi yang baik, Kecamatan dapat membantu Kelurahan dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

SARAN

Dalam meningkatkan Program Evaluasi Sinergitas Kinerja antar Kecamatan unggul di Provinsi Jawa Timur kedepannya dapat dilakukan dengan memperkuat kerja sama antar Pemerintah Kecamatan dalam berbagai bidang, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pemerataan kompetensi sumber daya manusia ASN untuk keunggulan Kecamatan seluruh Provinsi

di Indonesia dapat dilakukan dengan pengembangan kompetensi lokal yaitu membangun kemitraan dengan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kompetensi lokal yang sesuai dengan karakteristik Daerah. Dan menggunakan sistem informasi manajemen SDM untuk mengelola data kompetensi ASN, merencanakan kebutuhan pelatihan, dan memantau kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Diartho, H. C., Prananta, R., Fauziyah, D., & Kusmiati, A. (2023). STIA Pembangunan Jember ISSN Online : 2656-8977 Majalah Ilmiah. In *PELITA ILMU* (Vol. 6, Issue 1).
- Gani, M. A., Maulana, A., & Jember, U. M. (2024). *MENINGKATKAN KINERJA APARATUR KECAMATAN MELALUI PROGRAM PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN (SKK): STUDI DI KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023* (Vol. 14, Issue 1). Bulan.
- Hukum, J., Keagamaan, S., Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Etika Kerja Islam Pada KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Yulisharsasi, P., Surjanti, J., Kistyanto, A., Studi Manajemen, P., & Universitas Negeri Surabaya, P. (2022). A S A S W A T A N D H I M. In *Tahun* (Vol. 1, Issue 2).
- Rossa Ilma Silfiah, Munawaroh, & Aminullah. (2023). ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAHAN DESA PADA PERANGKAT DESA PAREREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR. *Journal Publicuho*, 6(3), 831–838. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.211>
- Aprilia, K. D. (2023). *EVALUASI SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA).
- Sukri, R. A., Naufal, M. H., & Syahri, M. R. A. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Etis dalam Program KKN-PPM UGM (Studi Kasus di Desa Wonocepokoayu, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur). *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna*, 1(1), 11-16.
- Karima, H. Q., Nugraha, N. A. S., Khomsah, S., & Wijayanto, S. (2023). Peningkatan Kapasitas Pokdarwis Pada Tata Kelola Desa Wisata Kampung Tudung Di Desa Grujugan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. *IJCOSIN: Indonesian Journal of Community Service and Innovation*, 3(1), 48-56.
- Nugraha, F. A., Sukristiyanto, A., & Basyar, M. R. (2024). GOOD TOURISM GOVERNANCE PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN SEBAGAI DESA WISATA BEJIJONG KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(12), 1-10.
- UTAMA, R. (2019). Sinergitas Bumdes Sebagai Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Tunas Unggul Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).
- Utoyo, B., & Faedlulloh, D. (2021). INNOVATIVE GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH OTONOM BARU: SINERGITAS STAKEHOLDER DALAM PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN DESA IKUT SEJAHTERA (GADIS) KABUPATEN PESAWARAN.
- Mellenia, F. O., Rahmaningsih, S. E., Yovianto, R., Wilopo, M. I. M., & Ravizki, E. N. (2023). Peranan Masyarakat Desa Dongko Dalam Mewujudkan Desa Wisata Budaya Bersama Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan*

Humaniora, 1(2), 105-121.

- Faedlulloh, D., & Utoyo, B. (2021). INNOVATIVE GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH OTONOM BARU: SINERGITAS STAKEHOLDER DALAM PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN DESA IKUT SEJAHTERA (GADIS) KABUPATEN PESAWARAN.
- Irwan Kurniawan Soetijono, I. K. S. (2019). Pembangunan Berbasis Partisipasi Menuju Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Di Desatamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. *PROSIDING TEMU ILMIAH NASIONAL BALITBANG TAHUN 2019 "PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI"*, 655-661.
- Wahyudi, S., & Suhardedi, C. (2020). Evaluasi Pasca Pelatihan Tematik Padi Lahan Rawa Angkatan IV di Kecamatan Martapura Timur Tahun 2019. *Jurnal Pengembangan Penyuluhan Pertanian*, 17(32), 207-221.
- Kuswandi, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 90-113.